

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 dan Qanun Aceh Nomor ..... Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015, maka dengan ini Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2015 berupa Laporan Keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2015 ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi. Laporan Keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2015, dapat diketahui kinerja keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh sebagai satu kesatuan dari perangkat Pemerintah Aceh baik pengelolaan pendapatan maupun serapan belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga dapat diketahui posisi dan kondisi keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh yaitu operasional, aset, kewajiban dan ekuitas selama satu tahun anggaran berkenaan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, 4 Agustus 2016  
KEPALA BADAN PEMBINAAN  
PENDIDIKAN DAYAH ACEH

(Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M.Si.)  
NIP. 19591231 198501 1 001

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA .....	
B. LAPORAN OPERASIONAL.....	
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	
C. NERACA.....	
D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA .....	5
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.2. Kebijakan Keuangan.....	5
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja .....	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja.....	7
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan .....	7
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	8
4.1. Entitas Akuntansi .....	8
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Menyusunan Laporan Keuangan .....	8
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	9

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah .....	12
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPA.....</b>	<b>16</b>
5.1. Laporan Realisasi Anggaran .....	16
5.2. Laporan Operasional.....	21
5.3. Laporan Perubahan Ekuitas .....	22
5.4. Neraca.....	22
5.5. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI .....	38
<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1 .....	
Tabel 2 .....	
<i>dst.</i> .....	

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1 .....  
Gambar 2 .....  
*dst.*.....

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPA Tahun Anggaran 2015
2. Rekonsiliasi Kas dan Bank Per 31 Desember 2015
3. Saldo BKU Per 31 Desember 2015
4. Saldo Rekening Bank Per 31 Desember 2015
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas
6. Register Penutupan Kas
7. Daftar Persediaan
8. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan
9. Daftar Persediaan Barang Modal yang Belum Diserahkan ke Kabupaten/Kota
10. Daftar Persediaan Barang yang Sudah Diserahkan Tahun 2015
11. Daftar Piutang \*
12. Rekapitulasi Barang
13. Daftar Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Tahun Anggaran 2015
14. Daftar Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan
15. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015
16. Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, 4 Agustus 2016

KEPALA BADAN PEMBINAAN  
PENDIDIKAN DAYAH ACEH

(Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M.Si.)  
NIP. 19591231 198501 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

**Maksud** penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Aceh melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2015 untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen  
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**Tujuan** penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:



- a. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- d. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- e. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan untuk tahun ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada SKPA Anggaran 2015.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
18. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1);
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 3)
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 48);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 69);
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80).
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 25)
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62)

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan

keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

**Bab V      Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Neraca; dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

**Bab VI     Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

**Bab VII    Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

### 2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2015 ini sebagian hanya sampai tahun 2012, karena sampai disusun laporan ini data tahun 2015 masih dalam proses perhitungan di BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

### 2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas dayah, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh disediakan anggaran yang relatif besar dan diberikan kewenangan untuk mengemban tugas yang cukup berat. Sebagai salah satu Badan yang berperan aktif dalam Pembangunan Aceh khususnya membina pendidikan dayah di Aceh. Berkaitan dengan kebijakan Anggaran yang dialokasikan kepada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, dimana alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 316.134.038.867,- sedangkan alokasi anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp. 376.040.278.880,-

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian keberhasilan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dalam mengemban amanat untuk mencapai visi dan misi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh sebagaimana yang tertuang pada Pasal 165 Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang fungsi dan kewenangan yang dimiliki Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah:

#### a. Fungsi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah;

- ❖ Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- ❖ Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- ❖ Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pendidikan dayah;
- ❖ Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dayah;
- ❖ Penyusunan program dan pelaksanaan program Pembinaan Pendidikan Dayah;
- ❖ Peningkatan kualitas daya diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang kajian agama, pendidikan, hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya serta lingkungan;
- ❖ Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan untuk kemajuan pembinaan dan pendidikan dayah;
- ❖ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- ❖ Pembinaan pelaksanaan teknis badan.

**b. Kewenangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah;**

- ❖ Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pendidikan dayah;
- ❖ Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pendidikan dayah;
- ❖ Menyusun program dan melaksanakan program rintisan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat dayah;
- ❖ Meningkatkan kualitas dayah terutama di bidang kajian agama, pendidikan, hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya serta lingkungan;
- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya kemampuan kelembagaan pengelolaan kemajuan pendidikan dayah; dan
- ❖ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN (AUDITED)**

##### **3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2015, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh pada Tahun Anggaran 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 376.040.278.880,00. Dari anggaran tersebut, realisasi yang telah dicapai per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 369.089.650.402,00 atau sebesar 98,15% dengan menyisakan anggaran sebesar Rp. 6.950.628.478,00 atau sebesar 1,85% dari total anggaran.

Rincian Realisasi Anggaran dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

###### **1. Realisasi Pendapatan.**

Realisasi pendapatan pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah NIHIL.

###### **2. Realisasi Belanja.**

Realisasi Belanja pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah terdiri dari; (a) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.937.702.446,00 atau sebesar 90.13% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6.588.088.459,00 dan (b) Belanja Langsung sebesar Rp. 363.151.947.956,00 atau sebesar 98,29% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 369.452.190.421,00 dengan rincian realisasi sebagaimana terlampir.

##### **3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh sampai saat ini masih dapat diatasi dengan adanya kerjasama dengan semua komponen yang terlibat dalam menjalankan organisasi.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-pratik spesifikasi yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

### 4.1 Entitas Akuntansi

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPA berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang menyediakan info yang relevan mengenai posisi kas, realisasi anggaran dan kinerja keuangan selama periode pelaporan.

Priode akuntansi yang digunakan adalah tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

*Restatement* basis akrual yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya adalah basis kas menuju akrual. Agar laporan keuangan dapat diperbandingkan, maka Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh melaksanakan penyajian kembali (*restatement*) neraca tahun 2014 pada awal tahun 2015, ketika Pemerintah Aceh untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual penyajian kembali (*restatement*) diselenggarakan untuk akun-akun neraca yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi.

Akun-akun yang perlu disajikan kembali antara lain:

- a. Piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang.
- b. Beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali.
- c. Persediaan yang esensinya adalah beban dibayar di muka, sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh.
- d. Investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Investasi jangka panjang yang tidak dapat dinilai berdasarkan metode ekuitas atau metode nilai bersih yang dapat direalisasikan disebabkan karena tidak cukup informasi/data terhadap nilai investasi tersebut, maka dapat disajikan berdasarkan metode biaya pada aset lainnya.

- e. Dana bergulir perlu disajikan kembali terkait pengakuannya yang harus memenuhi kriteria dana bergulir, apabila tidak memenuhi kriteria dimaksud maka tidak disajikan sebagai piutang dan/atau investasi dana bergulir (dapat disajikan pada aset lainnya).
- f. Aset tetap perlu disajikan kembali sesuai dengan nilai yang tercantum pada buku inventaris induk dan menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- g. Aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- h. Utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo.
- i. Pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali apabila pada periode sebelumnya belum disajikan.
- j. Ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

#### 4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

**Pengakuan** dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

**Pengakuan Kewajiban** diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**Pengakuan Pendapatan-LO** diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

**Pengakuan Pendapatan-LRA** diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

**Pengakuan Beban** diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

**Pengakuan Belanja** diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

**Pengakuan Investasi** diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

#### **Pengukuran Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Keandalan Pengukuran**, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

**Pengukuran Aset** adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d) Persediaan dicatat sebesar:
  - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

**Pengukuran Kewajiban** dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

**Pengukuran investasi jangka pendek** dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

**Pengukuran investasi jangka panjang** yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

##### **Akuntansi Pendapatan**

- Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

##### **Akuntansi Belanja**

- Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

##### **Akuntansi Surplus/Defisit**

- Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

##### **Akuntansi Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan SKPA. Jenis kas meliputi, kas di Bendahara Pengeluaran, dan kas di Bendahara Penerimaan.

Mutasi antar pos-pos kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi.

##### **Akuntansi Belanja dibayar dimuka**

Belanja dibayar dimuka adalah pengeluaran SKPA yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Aceh dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/ fasilitas dari pihak ketiga belum diterima atau dinikmati SKPA.

### Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang diakui dan dibukukan saat terjadinya transaksi yang menyebabkan timbulnya hak tagihan entitas Pemerintah Aceh kepada pihak lain sebesar jumlah yang menjadi hak entitas Pemerintah Aceh.

### Akuntansi Persediaan

- Persediaan merupakan aset yang berwujud:
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, selain itu termasuk juga barang-barang yang dimaksud untuk diserahkan kepada masyarakat/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus berupa alat berat, kendaraan, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan dan lainnya. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/kabupaten/kota dicatat sebagai penambah aset lancar, dan pengurangan nilai persediaan tersebut dilakukan setelah adanya berita acara serah terima barang/dokumen yang dipersamakan.

### Akuntansi Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Aset tetap Pemerintah Aceh disajikan berdasarkan nilai buku, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan melaksanakan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Penyesuaian dimaksud adalah mutasi aset tetap, reklasifikasi aset, koreksi penambahan/pengurangan nilai aset tetap.

- Aset tetap yang sulit ditentukan nilai perolehannya dicantumkan bernilai Rp1, namun nilai tersebut tidak terakumulasi di dalam aset tetap dan diklasifikasikan dalam aset lainnya. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan agar paling tidak aset tersebut dicatat terlebih dahulu dan penilaian secara akurat tetap akan dilaksanakan.\
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

#### **Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
  - (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
  - (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

#### **Akuntansi Kewajiban**

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa**

- Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (AUDITED)**

**5.1. Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1. Pendapatan**

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 0,00 Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	Anggaran %	Total %
1					
2					
3					
4					
5					
<b>Jumlah Pendapatan</b>					

**NIHIL**

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak/Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh.

**5.1.2. Belanja**

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 369.089.650.402,00 atau 98,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 376.040.278.880,00 Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Operasi	318.426.312.880,00	312.239.878.152,00	98,06	84,60
2	Belanja Modal	57.613.966.000,00	56.849.772.250,00	98,67	15,40
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>376.040.278.880,00</b>	<b>369.089.650.402,00</b>	<b>98,15</b>	<b>100,00</b>

**1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar Rp. 312.239.878.152,00 atau 98,05% dari rencana yang sebesar Rp. 318.426.312.880,00 Rincian belanja operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Pegawai	6.682.668.459,00	6.032.250.446,00	90,27	1,93
2	Belanja Barang	311.743.644.421,00	306.207.627.706,00	98,22	98,07
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>318.426.312.880,00</b>	<b>312.239.878.152,00</b>	<b>98,05</b>	<b>100,00</b>

**a. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 6.032.250.446,00 atau 90,27% dari total realisasi Belanja Operasi.

Uraian	TA 2015 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.190.008.071,00-
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.747.694.375,00-
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00
Insentif Pemungutan Pajak Aceh	0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Aceh	0,00
Uang Lembur	94.548.000,00
Belanja Pegawai BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.032.250.446,00</b>

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 306.207.627.706,00 atau 98.22% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2015 (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	562.909.000,00
Belanja Bahan/Material	861.080.300,00
Belanja Jasa Kantor	5.059.513.004,00
Belanja Premi Asuransi	0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	302.604.614,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	707.532.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.314.652.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	2.651.589.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	70.523.000,00
Belanja Pakaian Kerja	0,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	5.005.213.686,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00
Belanja Pemulangan Pegawai	0,00
Belanja Pemeliharaan	199.697.000,00
Belanja Jasa Konsultansi	129.030.000,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	243.388.614.602,00
Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.119.934.500,00
Belanja Honorarium Non Pegawai	769.200.000,00
Honorarium PNS	1.089.440.000,00
Honorarium Non PNS	41.160.895.000,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.682.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>306.207.627.706,00</b>

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 terealisasi sebesar Rp. 56.849.772.250,00 atau 98.67% dari anggaran sebesar Rp. 57.613.966.000,00 Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Tanah	3.000.000.000,00	2.999.405.000,00	99.98	5.28
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.853.786.000,00	1.819.288.250,00	98.14	3.20
3	Belanja Gedung dan Bangunan	9.746.725.000,00	9.736.943.000,00	99.90	17.13
4	Belanja Jalan, Irigasi dan	753.455.000,00	753.159.000,00	99.96	1.32



	Jaringan				
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	42.260.000.000,00	41.540.977.000,00	98.30	73.07
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>57.613.966.000,00</b>	<b>56.849.772.250,00</b>	<b>98.67</b>	<b>100.00</b>

a. Belanja Tanah

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2015 sebesar Rp. 2.999.405.000,00 atau 99,98% dari total realisasi belanja modal, dan diperuntukkan untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan.

Rincian belanja modal tanah TA 2015 adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2015 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan	0,00
Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran	0,00
Belanja modal Pengadaan Hutan	0,00
Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.999.405.000,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00
Belanja modal BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.999.405.000,00</b>

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 1.819.288.250,00 atau mempunyai porsi sebesar 98.14% dari total realisasi Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2015 adalah sebagai berikut ;

Uraian	TA 2015 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	445.357.250,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	322.331.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	239.660.000,00
Belanja modal Pengadaan Komputer	403.442.000,00
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	94.384.000,00
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	314.875.000,00

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0,00
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00
Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0,00
Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00
Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00
Belanja modal Pengadaan Senjata Api	0,00
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00
Belanja modal Pengadaan Amunisi	0,00
Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00
Belanja modal BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.819.288.250,00</b>

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 9.736.943.000,00 atau 99,90% dari total realisasi belanja modal. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2015 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.518.318.000,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.218.625.000,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	0,00
Belanja modal Pengadaan Candi	0,00
Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00
Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan	0,00
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	0,00
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00
Belanja modal BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.736.943.000,00</b>

d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 753.159.000,00 atau 99,96% dari total realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telpon. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2015 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Jalan	0,00
Belanja modal Pengadaan Jembatan	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	144.774.000,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	608.385.000,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	0,00
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	0,00
Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	0,00
Belanja modal BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>753.159.000,00</b>

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp. 41.540.977.000,00 atau 98,30% dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan serta dan tanaman dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2015 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Buku	41.540.977.000,00
Belanja modal Pengadaan Terbitan	0,00
Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0,00
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00
Belanja modal Pengadaan Hewan	0,00
Belanja modal Pengadaan Tanaman	0,00
Belanja modal BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>41.540.977.000,00</b>

**Surplus/Defisit**

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.0,00 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 369.089.650.402,00 Laporan Keuangan mengalami (Defisit) sebesar Rp. 369.089.650.402,00

**5.2. Laporan Operasional**

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Tahun 2015 mencapai Rp. 0,00 Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realiasi Tahun 2015
1		0,00
2		0,00
3		0,00
<i>dst</i>		
<b>Jumlah</b>		

5.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2015 mencapai Rp. 491.573.393.251,30 Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realiasi Tahun 2015
1	Beban Pegawai	6.032.250.446,00
2	Beban Barang	483.446.731.964,00
3	<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	2.094.410.841,30
<b>Jumlah</b>		<b>491.573.393.251,30</b>

### 1. Beban Pegawai

Uraian	TA 2015 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	3.190.008.071,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	2.747.694.375,00
Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	0,00
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	0,00
Insentif Pemungutan Pajak Aceh – LO	0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Aceh – LO	0,00
Uang Lembur – LO	94.548.000,00
Belanja Pegawai BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.032.250.446,00</b>

### 2. Beban Barang

Uraian	TA 2015 (Rp)
Beban Bahan Pakai Habis	561.040.650,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	861.080.300,00
Beban Jasa Kantor	5.186.252.425,00
Beban Premi Asuransi	0,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	302.604.614,00
Beban Cetak dan Penggandaan	707.532.000,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.314.652.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00
Beban Sewa Alat Berat	0,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.400.000,00
Beban Makanan dan Minuman	2.651.589.000,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	70.523.000,00
Beban Pakaian Kerja	0,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00
Beban Perjalanan Dinas	5.005.213.686,00
Beban Perjalanan Pindah Tugas	0,00
Beban Pemulangan Pegawai	0,00
Beban Pemeliharaan	199.697.000,00
Beban Jasa Konsultasi	129.030.000,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	420.502.847.789,00
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.119.934.500,00
Beban Honorarium Non Pegawai	769.200.000,00
Honorarium PNS	1.089.440.000,00
Honorarium Non PNS	41.160.895.000,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.682.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD *	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>483.446.731.964,00</b>

### 3. *Beban Penyusutan dan Amortisasi*

Uraian	TA 2015 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.278.812.391,34
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	809.845.949,96
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.752.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.094.410.841,30</b>

### Surplus/Defisit - LO

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 0,00 dan Beban Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 491.573.393.251,30 Laporan Keuangan mengalami Defisit – Lo (Surplus/Defisit) sebesar Rp. 491.573.393.251,30.

### 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas SKPA.

Ekuitas akhir per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 139.005.341.401,93 yang terdiri dari penambahan ekuitas awal atau saldo ekuitas per 31 Desember 2015, yaitu sebesar Rp. 267.144.738.045,00 Surplus/Defisit- LO sebesar Rp. (491.573.393.251,30), RK PPKD sebesar Rp. 369.089.650.402,00 dan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp. (6.027.653.793,77) serta Koreksi aset tetap baru ditemukan (hasil sensus/inventarisasi) sebesar Rp. 372.000.000,00.

### 5.4. Neraca

#### 5.4.1. Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

#### A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2015 terdiri dari :

Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
Piutang Pajak/Retribusi	Rp.	0,00
Piutang Lain-lain	Rp.	0,00
Sewa Dibayar Dimuka	Rp.	0,00
Asuransi Dibayar Dimuka	Rp.	0,00
Persediaan	Rp.	17.627.650,00
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>Rp.</b>	<b>17.627.650,00</b>

#### 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014	NIHIL	NIHIL

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan nihil dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 dan 2014	NIHIL	NIHIL

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun 2015 dan belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Piutang Retribusi

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 dan 2014	NIHIL	NIHIL

Piutang Retribusi merupakan hak Pemerintah Aceh yang ditandai dengan telah dikeluarkan nya SKPAnamun penyeteroran belum dilakukan oleh wajib retribusi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Piutang Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014	NIHIL	NIHIL

Piutang Lain-lain merupakan NIHIL dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. Sewa Dibayar Dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 2014	NIHIL	NIHIL

Sewa Dibayar Dimuka merupakan NIHIL dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6. Asuransi Dibayar Dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 2014	NIHIL	NIHIL

Piutang Lain-lain merupakan NIHIL dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
		0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7. Persediaan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014	17.627.650,00	177.119.368.437

Persediaan sebesar Rp. 17.627.650,00 terdiri dari barang pakai habis yang masih tersisa per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 9.403.600,00 dan Persediaan Bahan/ Material sebesar Rp. 8.224.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Barang Pakai Habis

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	ATK	3.525.850,00
2		
	<b>Jumlah</b>	<b>3.525.850,00</b>

2) Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Peralatan Listrik	3.477.750,00
2		
	<b>Jumlah</b>	<b>3.477.750,00</b>

3) Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.400.000,00
2		
	<b>Jumlah</b>	<b>2.400.000,00</b>

b. Persediaan Bahan/Material

1) Persediaan Peralatan Rumah Tangga

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Peralatan Rumah Tangga	8.224.050,00
2		
<b>Jumlah</b>		<b>8.224.050,00</b>

c. Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain

1) Persediaan Bangunan Gedung

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1		0,00
2		
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>

B. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian	Rp
1. Aset Tetap	139.116.853.172,93
2. Aset Lainnya	0,00
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>139.116.853.172,93</b>

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2014	Realisasi Belanja Modal TA 2015	Penyesuaian Nilai	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2015 setelah penyesuaian
1	Tanah	1.880.500.000,00	2.999.405.000,00	0,00	4.879.905.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.488.011.042,00	1.819.288.250,00	937.183.950,00	11.244.483.242,00
3	Gedung dan Bangunan	69.828.707.498,00	9.736.943.000,00	(213.053.000,00)	79.352.597.498,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	208.630.000,00	753.159.000,00	(608.385.000,00)	353.404.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	8.945.856.832,00	41.540.977.000,00	248.030.000,00	50.734.863.832,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	673.664.236,00	0,00	0,00	673.664.236,00
7	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	(8.122.064.635,07)	(8.122.064.635,07)
	<b>JUMLAH</b>	<b>90.025.369.608,00</b>	<b>56.849.772.250,00</b>	<b>(7.758.288.685,07)</b>	<b>139.116.853.172,93</b>

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

a. Tanah

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>4.879.905.000,00</b>	<b>1.880.500.000,00</b>



Tanah dengan rincian sebagai berikut:.

Uraian	Rp
• Saldo Awal	1.880.500.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	2.999.405.000,00
- Hibah	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Barang pakai habis	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>4.879.905.000,00</b>

b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>11.244.483.242,00</b>	<b>8.488.011.042,00</b>

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) Alat-alat Bantu

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Bantu per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>995.851.250,00</b>	<b>422.443.250,00</b>

Alat-alat Berat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	422.443.250,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Bantu terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	573.408.000,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Bantu terdiri dari:	
- Hibah	0,00

Uraian	Rp
- Barang pakai habis	0,00
Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi Antar Aset Tetap	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>995.851.250,00</b>

## 2) Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Alat-Alat Angkutan per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>2.306.867.692,00</b>	<b>1.489.510.442,00</b>

Alat-alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	1.489.510.442,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	445.357.250,00
- Hibah	372.000.000,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar Aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Barang pakai habis	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>2.306.867.692,00</b>

## 3) Alat-alat Bengkel dan Ukur

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Bengkel dan Ukur per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>60.060.000,00</b>	<b>60.060.000,00</b>

Alat-alat Bengkel dan Ukur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	60.060.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Bengkel dan Ukur terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Bengkel dan Ukur terdiri dari:	
- Hibah ke Kab/Kota	0,00
- Barang pakai habis	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>60.060.000,00</b>

4) Alat Pertanian dan Peternakan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2014 dan 2012.	NIHIL	NIHIL

Alat-alat Pertanian dan Peternakan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	0,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Barang pakai habis	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00

Uraian	Rp
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>0,00</b>

5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>6.832.433.300,00</b>	<b>5.781.601.350,00</b>

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	5.781.601.350,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	1.059.056.000,00
- Hibah	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Barang pakai habis	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	8.224.050,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>6.832.433.300,00</b>

6) Alat Studio dan Alat Komunikasi

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>1.049.271.000,00</b>	<b>734.396.000,00</b>

Alat-alat Studio dan Komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	734.396.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	314.875.000,00
- Hibah	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00

Uraian	Rp
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Alat Studi dan Komunikasi terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Barang pakai habis	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>1.049.271.000,00</b>

c. Gedung dan Bangunan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>79.352.597.498,00</b>	<b>69.828.707.498,00</b>

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1) Bangunan Gedung

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>79.200.867.498,00</b>	<b>69.676.977.498,00</b>

Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	69.676.977.498,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	34.977.000,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Barang pakai habis	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	248.030.000,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>79.200.867.498,00</b>

2) Bangunan Monumen dan Tugu

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Monumen per 31 Desember 2015 dan 2014.	151.730.000,00	151.730.000,00

Bangunan Monumen dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	151.730.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Barang pakai habis	0,00
- Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>151.730.000,00</b>

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014.	353.404.000,00	208.630.000,00

1) Bangunan Air (Irigasi)

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2015 dan 2014.	326.174.000,00	181.400.000,00

Bangunan Air (Irigasi) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	181.400.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Air (Irigasi) terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	144.774.000,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Bangunan Air (Irigasi) terdiri dari:	
- Hibah	0,00

Uraian	Rp
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>326.174.000,00</b>

## 2) Instalasi

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2015 dan 2014.	NIHIL	NIHIL

Instalasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	0,00
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	753.159.000,00
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Instalasi terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	753.159.000,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>0,00</b>

## 3) Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014.	27.230.000,00	27.230.000,00

Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	27.230.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Jaringan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00

Uraian	Rp
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- .....	
• Pengurangan aset tetap Jaringan terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
- .....	
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>27.230.000,00</b>

e. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014.	50.734.863.832,00	8.945.856.832,00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1) Buku dan Perpustakaan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2015 dan 2014.	50.435.956.832,00	8.646.949.832,00

Buku dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	8.646.949.832,00
• Penambahan nilai aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	41.540.977.000,00
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	248.030.000,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>50.435.956.832,00</b>



2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2015 dan 2014.	298.907.000,00	298.907.000,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	298.907.000,00
• Penambahan nilai aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>298.907.000,00</b>

3) Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Hewan/ Ternak dan Tumbuhan per 31 Desember 2015 dan 2014.	NIHIL	NIHIL

Hewan/Ternak dan Tumbuhan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	0,00
• Penambahan nilai aset tetap Hewan/Ternak dan Tumbuhan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset tetap Hewan/Ternak dan Tumbuhan terdiri dari:	
- Hibah	0,00

Uraian	Rp
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>0,00</b>

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>673.664.236,00</b>	<b>673.664.236,00</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	673.664.236,00
• Penambahan nilai aset Kontruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2015	0,00
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
• Pengurangan aset Kontruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari:	
- Hibah	0,00
- Reklasifikasi antar aset tetap	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
- Mutasi antar SKPA	0,00
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	0,00
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0,00
- Penyusutan	0,00
- Penghapusan	0,00
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>673.664.236,00</b>

g. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 dan 2014.	<b>(8.122.064.635,07)</b>	<b>0,00</b>

Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	0,00
• Penambahan nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2015 terdiri dari:	
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.195.254.605,11)

- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.909.203.529,96)
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(17.606.500,00)
<b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>	<b>(8.122.064.635,07)</b>

## 2. Aset Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014.	0,00	0,00

Aset lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00 terdiri dari Aset Lain-lain sebagai berikut:

### a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014.	NIHIL	NIHIL

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan NIHIL.

### b. Aset Tak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014.	NIHIL	NIHIL

Aset Tak Berwujud merupakan NIHIL.

### c. Aset Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2015 (Rp)	Per 31 Desember 2014 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014.	0,00	0,00

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset tetap yang tidak dapat diukur secara andal juga direklasifikasi sebagai aset lain-lain.

Aset lain-lain per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,00 terdiri dari aset yang tidak dapat digunakan karena rusak berat/usang sebesar Rp 0,00, aset yang tidak ditemukan(hilang) sebesar Rp 0,00 dan aset yang dihibahkan ke Kabupaten/Kota yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) sebesar Rp 0,00.

### 5.4.2. Kewajiban

Kewajiban adalah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### A. Kewajiban Jangka Pendek

Diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 terdiri dari :

Uraian	Rp
1. Utang Belanja Barang dan Jasa:	
Utang Belanja Telepon	1.736.312,00
Utang Belanja Air	21.384.400,00
Utang Belanja Listrik	106.018.709,00
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>129.139.421,00</b>

#### 5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara ekuitas dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 139.005.341.401,93

#### 5.2 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI

Pengungkapan untuk masalah ini tidak dapat dijelaskan berhubung belum ada transaksi atau peristiwa yang berkaitan dengan masalah tersebut.

## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN (AUDITED)

Adapun yang menjadi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan adalah permasalahan dalam penyelenggaraan Laporan Keuangan pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh tahun 2016 dan upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Kurang maksimalnya jaringan internet untuk SKPA yang menyebabkan sistem SIPKD kurang lancar dalam rangka untuk penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
2. Terbatasnya aparatur pengelolaan keuangan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang belum mendalami masalah pengelolaan keuangan.
3. Masih ditemui adanya kesalahan dalam penganggaran (DPA-SKPA) sehingga menyulitkan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku.

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya (d disesuaikan dengan kondisi SKPA):

- a. Domisili dan bentuk hukum suara entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya;
- d. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
- e. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- f. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- g. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan;
- h. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

*\*Hanya catatan; tidak ditampilkan pada CaLK*

## **BAB VII PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2015 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2014 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, 4 Agustus 2016  
KEPALA BADAN PEMBINAAN  
PENDIDIKAN DAYAH

(Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M. Si)  
NIP. 19591231 198501 1 001

A. Laporan Realisasi Anggaran

**PEMERINTAH ACEH  
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI ACEH</b>				
1.1.1	Pajak Aceh	0,00	0,00		0,00
1.1.2	Retribusi Aceh	0,00	0,00		0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	0,00	0,00		0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	0,00	0,00		0,00
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2	<b>BELANJA</b>				
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai				45.807.031.567,00
2.1.2	Belanja Barang				195.823.600.820,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>				<b>241.630.632.387,00</b>
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>				
2.2.1	Belanja Tanah				0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				1.182.497.000,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				55.760.585.734,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				8.530.781.000,00
	.....				
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>				<b>65.473.863.734,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>307.104.496.121,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>				<b>(307.104.496.121,00)</b>

Banda Aceh, 27 Januari 2016  
KEPALA BADAN PEMBINAAN  
PENDIDIKAN DAYAH ACEH

(Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M. Si)  
NIP. 19591231 198501 1 001

## B. Laporan Operasional

**PEMERINTAH ACEH  
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH  
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014

URAIAN	2015	2014	Kenaikan/ Penurunan	(%)
<b><u>KEGIATAN OPERASIONAL</u></b>				
<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
<b>PENDAPATAN ASLI ACEH</b>				
Pendapatan Pajak Aceh	0,00	0,00		
Pendapatan Retribusi Aceh	0,00	0,00		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	0,00	0,00		
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	0,00	0,00		
<b>Jumlah Pendapatan Asli Aceh</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b><u>BEBAN</u></b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai		45.807.031.567,00		
Beban Belanja Barang		195.823.600.820,00		
<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>241.630.632.387,00</b>		
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>241.630.632.387,00</b>		
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>(241.630.632.387,00)</b>		

Banda Aceh, 27 Januari 2016  
KEPALA BADAN PEMBINAAN  
PENDIDIKAN DAYAH ACEH

(Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M. Si)  
NIP. 19591231 198501 1 001



C. Laporan Perubahan Ekuitas

**PEMERINTAH ACEH**  
**BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
1	EKUITAS AWAL	267.144.738.045,00	24.560.567.174,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO		(307.104.496.121,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP		
6	LAIN-LAIN		
7	EKUITAS AKHIR		

Banda Aceh, 27 Januari 2016  
KEPALA BADAN PEMBINAAN  
PENDIDIKAN DAYAH ACEH

(Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M. Si)  
NIP. 19591231 198501 1 001

D. NERACA

**PEMERINTAH ACEH**  
**BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH NERACA**  
 Per 31 Desember 2015 dan 2014

(Dalam Rupiah)

URAIAN (1)	Tahun n (2)	Tahun n-1 (3)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah (4)	% (5)
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
<b>Kas</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00		
<b>Jumlah Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Piutang</b>				
Piutang Pajak	0,00	0,00		
Piutang Retribusi	0,00	0,00		
Piutang Lain-lain	0,00	0,00		
Penyisihan Piutang	0,00	0,00		
<b>Jumlah Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>				
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00		
Asuransi Dibayar Dimuka	0,00	0,00		
<b>Jumlah Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Persediaan</b>				
Persediaan Barang Pakai Habis		3.206.250,00		
Alat Listrik		1.929.000,00		
Persediaan Barang Modal yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Lain		177.114.233.187,00		
<b>Jumlah Persediaan</b>		<b>177.119.368.437,00</b>		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>177.119.368.437,00</b>		
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah		1.880.500.000,00		
Peralatan dan Mesin		8.488.011.042,00		
Gedung dan Bangunan		69.828.707.498,00		
Jalan, Irigasi dan Jaringan		208.630.000,00		
Aset Tetap Lainnya		9.619.521.068,00		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00		
Akumulasi Penyusutan		0,00		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>90.025.369.608,00</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00		
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00		
Aset Lain-lain	0,00	0,00		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>90.025.369.608,00</b>		
<b>TOTAL ASET</b>		<b>267.144.738.045,00</b>		
<b>EKUITAS</b>		<b>267.144.738.045,00</b>		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>267.144.738.045,00</b>		
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>267.144.738.045,00</b>		

Banda Aceh, 27 Januari 2016  
 KEPALA BADAN PEMBINAAN  
 PENDIDIKAN DAYAH ACEH

(Dr. Bustami Usman, SH., SAP., M. Si)  
 NIP. 19591231 198501 1 001